

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemetaan kemiskinan pada 38 provinsi di Indonesia memberikan sebuah pemahaman bahwa masalah kesejahteraan di Indonesia ini belum dirasakan secara merata. Hal ini dibuktikan dengan tingginya daerah yang masih berada dalam klaster miskin berdasarkan pengaruh sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi yakni 17 provinsi atau sekitar 44,74%. Tingginya persentase provinsi miskin di Indonesia ini merupakan hambatan utama belum tercapainya rencana SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045 karena kesejahteraan rakyat tidak dirasakan secara merata.
2. Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel, sebagian besar daerah miskin terkhusus 4 provinsi bagian Papua, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki kondisi sdm yang rendah seperti tingginya persentase anak yang tidak/belum sekolah dan tingginya partisipasi bekerja pada usia anak 15 tahun ke atas. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah program adopsi dari Amerika “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Program ini bukan hanya memberikan peluang bagi anak pada keluarga tidak mampu yang ingin bersekolah tinggi, tetapi program ini juga dapat menjadi media kampanye pendidikan yang lebih efektif karena meningkatkan latar belakang orang tua.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Kementerian sosial meninjau penelitian tentang kemiskinan ini lebih lanjut. Mengingat kemiskinan masih menjadi masalah utama suatu daerah atau negara yang memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan daerah tersebut.
2. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan adanya pembaruan metode klaster dengan kompleksitas data dalam memberikan solusi untuk isu sosial atau masalah lainnya
3. Peneliti menyarankan agar pemerintahan daerah perhatian terhadap kondisi kemiskinan yang terjadi di daerahnya. Karena kemiskinan daerah itu dapat terjadi karena tidak adanya kesejahteraan hidup layak yang dimiliki oleh warganya, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan ekonomi pada sektor PDRB daerah.
4. Peneliti menyarankan agar badan pusat pengolahan data atau Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dapat mengadopsi sistem pembelajaran mesin seperti yang digunakan dalam penelitian ini untuk kebutuhan pembuatan sistem monitoring dan evaluasi masalah sosial termasuk kemiskinan, pengangguran, dan isu multidimensi kehidupan lainnya.